

Kubar Mendapat Penghargaan WDP Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2011 dari BPK

BUPATI Kubar, Ismail Thomas, mengatakan, sangat penting mendapatkan predikat baik dalam pengelolaan keuangan, apalagi Pemkab telah mendapatkan predikat pengelolaan pemerintahan terbaik. Pemkab sangat konsen memperingatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)¹ untuk terus memperbaiki dan penataan administrasi sesuai asas yang berlaku.

Hal itu disampaikan, Jumat (6/7), setelah Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Sri Haryoso Suliyanto menyerahkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan² Pemkab Kubar Tahun Anggaran 2011 kepada DPRD Kubar dan Bupati Kubar di Ruang Pertemuan Lantai Tiga Gedung BPK Jalan M. Yamin Nomor 19 Samarinda, Kamis sore (5/7) dengan hasilnya, Kubar mendapatkan predikat WDP.

Lebih jauh dikatakannya, dengan masukan BPK segera ditindaklanjuti, bukan hanya karena tuntutan aturan tetapi tekad terus memperbaiki pengeluaran keuangan di Kubar. Dengan hasil evaluasi/audit, tentu bermanfaat bagi Kubar di masa datang dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan Kubar yang masyarakatnya semakin cerdas, sehat, produktif dan sejahtera berbasis ekonomi kerakyatan. “Cita-cita pembangunan dapat terealisasi secara maksimal, tentu tergantung kemampuan keuangan dan pengelolaan sesuai aturan, baik segi hukum negara maupun moral,” ungkap Bupati.

Hasil audit dan evaluasi terhadap Laporan Keuangan Pemkab Kubar untuk anggaran 2011 lalu, ditindaklanjuti dengan memperhatikan catatan-catatan penting. Sehingga menjadi lebih baik dan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta menjadi acuan bagi penyusunan LKPD³ Kubar Tahun Anggaran 2012 di masa-masa datang.

Bupati juga berharap, BPK tetap bersedia melakukan pendampingan, pembinaan dan pelatihan, khususnya menyangkut tata cara pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan bagi bendahara SKPD Pemkab Kubar. Sehingga keuangan negara dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta memenuhi rasa keadilan dan kepatuhan.

“Saya yakin dengan adanya pendampingan, pembinaan dan pelatihan secara berkala dan berkelanjutan, serta dengan laporan ketat dari pihak-pihak terkait Laporan Keuangan Pemkab Kubar akan semakin baik dan mengarah kepada tahapan wajar tanpa pengecualian,” katanya optimis.

Kondisi itulah katanya, terus diharapkan, sebab pemerintahan lahir dari dan dikehendaki masyarakat melalui pesta demokrasi. Berarti, masyarakat

menghendaki perbaikan dan tanggung jawab terhadap keseluruhan proses dan kegiatan pembangunan. (adv)

Sumber berita : *Tribun Kaltim*, Rabu, 11 Juli 2012, Halaman 24.

¹**Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD):** Organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.

²**Laporan keuangan:** Laporan-laporan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu dan hasil usaha dalam periode yang bersangkutan.

³**Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD):** Laporan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN/APBD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

JDIH BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR